

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN PEMODERASI KOMITMEN ORGANISASI
(Studi Pada Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten)**

Triyanto

*Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
JL. Syeh Nawawi Al Bantani Kav.H1-2 KP3B
3triyanto@gmail.com*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the factors that affect the quality of financial statements by moderating organizational commitment at the Central Bureau of Statistics of Banten Province. The population of this study is financial managers who have the duties and responsibilities in financial management that directly or indirectly affect the quality of financial reports in the 9 work units of the Banten Provincial Statistics Agency. Data collection by distributing 70 questionnaires to financial managers. The sampling technique uses a census method in which the entire study population is used as the research sample. The method of data analysis was done by PLS SEM with the help of the Smart PLS program. The results of this study prove that the implementation of accrual-based government accounting standards, the use of information technology has a significant positive effect on the quality of financial statements while the understanding of accounting and the role of internal audit does not affect the quality of financial statements. Organizational commitment as a moderating variable is not able to moderate the influence of the application of accrual-based accounting standards, understanding accounting, utilization of information technology and the role of internal audit on the quality of financial statements.

Keywords: *Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards, Understanding of Accounting, the Use of Information Technology, Role of Internal Audit, Organizational Commitment, Quality of Financial Statement.*

PENDAHULUAN

Tuntutan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan prinsip *good governance*, membuat pemerintah terus melakukan perbaikan dan perubahan guna mewujudkan hal tersebut. Perubahan tersebut dalam rangka memenuhi prinsip *good governance* yaitu *transparency, fairness, responsibility dan accountability* (Soelendro, 2000 dalam Sadjarto, 2000). Tujuan dari penerapan *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif. Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Pusat diwujudkan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Terhitung mulai 1 Januari 2015 seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Pusat wajib menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan. Perubahan standar akuntansi berbasis kas ke standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat berdampak pada penurunan Opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada 86 entitas yang dijadikan ruang lingkup pemeriksaan. Penurunan opini atas Laporan keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) terjadi pada Opini Wajar

Tanpa Pengecualian sebanyak 6 Kementerian/Lembaga dari 62 menjadi 56 atau sebesar 9,6%, diperkirakan turun menjadi Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan terjadi kenaikan opini Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 8 Kementerian/Lembaga dari 18 menjadi 26 atau naik sebesar 44%. Untuk Opini Tidak menyatakan pendapat turun sebanyak 3 Kementerian/Lembaga dari 7 menjadi 4. Badan Pusat Statistik merupakan salah satu Lembaga Non Kementerian yang Opini atas Laporan Keuangannya pada Tahun 2015 mengalami penurunan dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akibat penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka diperlukan pemahaman akuntansi oleh pengelola sistem akuntansi instansi dan pejabat pengelola keuangan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Keuangan selaku Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan keuangan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah. Total APBN dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah (sugiyono,2002). Keuangan Negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat serta peran dari audit intern untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Wakhyudi, 2005). Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, selain dari faktor sumber daya manusia baik dari segi pemahaman akuntansi, maupun pengawasan dari auditor internal dan pemanfaatan teknologi informasi, faktor penting yang lain adalah komitmen organisasi

Menurut Penelitian yang dilakukan Evicahyani (2015) menyatakan bahwa kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD) berpengaruh positif dan signifikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kualitas LKPD Kabupaten Tabanan melalui variabel intervening, yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Yuliani *et.,al* (2010) menyatakan bahwa secara simultan dan parsial pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Inapty dan Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, dan penelitian Al-Shetwi *et.,al.* (2011) juga menyatakan bahwa fungsi audit internal tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa permasalahan yang terjadi dan menjadi fenomena dalam penelitian ini salah satunya ketidaksiapan Badan Pusat Statistik dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang menyebabkan turunnya kualitas Laporan keuangan. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan memahami tentang proses akuntansi sampai menjadi suatu laporan keuangan merupakan permasalahan lain yang juga dihadapi Badan Pusat Statistik. Penyusunan laporan keuangan hanya sekedar memenuhi kewajiban pelaporan, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan sangat rentan terhadap salah saji materiil. Dalam era Internet *financial reporting*, maka sarana penunjang teknologi dan informasi menjadi hal yang sangat penting. Pada Badan Pusat Statistik, para pengelola keuangan belum disediakan sarana Teknologi informasi yang optimal seperti kurangnya laptop ataupun PC yang digunakan khusus untuk penyusunan laporan keuangan. Pada Badan Pusat Statistik jumlah auditor secara kuantitas dan kualitas masih sangat minim. Saat ini jumlah auditor sebanyak 66 orang dengan jumlah satuan kerja seluruh Indonesia sebanyak 512. Dari jumlah 68 auditor hampir 70% latarbelakang pendidikan non akuntansi. Permasalahan lain yang dihadapi Badan Pusat Statistik komitmen organisasi. Berdasarkan Assesment test yang dilakukan pada tahun 2015, nilai komitmen organisasi pada Badan Pusat Statistik tergolong rendah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Suwanda (2015) di Indonesia yang menguji seberapa besar pengaruh implementasi SAP, kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan hubungannya dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAP dan komitmen organisasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan kualitas SDM, implementasi sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini mengganti kualitas SDM dengan variabel pemahaman akuntansi serta merubah komitmen organisasi sebagai variabel moderating.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Scott (2000) dalam Bangun (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Giraldi (2001) dalam Sudiarianti (2015) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) asumsi yang melandasi teori keagenan, yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia; (2) asumsi tentang keorganisasian; (3) asumsi tentang informasi. Lane (dalam Abdullah dan Halim, 2006) berpendapat bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Lane (dalam Abdullah dan Halim, 2006) juga menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen dalam sektor publik.

Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengakibatkan permasalahan yaitu terjadi asimetri informasi dimana agen memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih memahami mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dibandingkan informasi posisi keuangan yang dimiliki oleh prinsipal. Permasalahan lain yang timbul adalah terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan antara prinsipal dan agen dimana agen lebih mementingkan kepentingannya daripada kepentingan prinsipal. Permasalahan yang timbul dari hubungan prinsipal dan agen dalam menyampaikan laporan keuangan membuat informasi dari laporan keuangan tidak berkualitas karena tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga keputusan yang diambil menjadi kurang tepat. Upaya dalam mengatasi masalah hubungan keagenan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen.

Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan principal. Dalam penelitian dapat digambarkan bahwa biaya keagenan (*agency cost*) yang ditimbulkan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dihubungkan dengan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi dapat dikategorikan biaya keagenan sebagai *bonding cost*, peran internal audit termasuk kategori jenis biaya keagenan *monitoring cost* dan komitmen organisasi dapat dikategorikan biaya keagenan sebagai *residual loss*.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas adalah laporan yang berisi transaksi keuangan yang memberikan informasi mengenai keuangan suatu entitas sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah yang sesuai dengan kadar tertentu yaitu standar akuntansi pemerintahan. Persyaratan normatif atau karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 270/PMK.05/2014 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat, SAP berbasis akrua adalah prinsi-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Impelementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrua dalam penyusunan laporan keuangan disusun menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Aplikasi Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Indikator Variabel dalam Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrua adalah penyajian laporan keuangan berbasis akrua, penyajian LRA berbasis Kas, penyajian CALK secara lengkap, pengakuan dan pencatatan aset tetap dan kewajiban, pelaksanaan koreksi kesalahan, pelaksanaan laporan keuangan konsolidasian

Pemahaman Akuntansi

Agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami dengan benar proses akuntansi pada tahap awal sampai dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, khususnya sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Yuliani (2010) Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indikator Variabel dalam Pemahaman Akuntansi adalah tingkat pemahaman terhadap komponen laporan keuangan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi, tingkat pemahaman terhadap pengakuan unsur-unsur laporan keuangan

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut ITTA (Information Technology Association of America), teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Amriani (2014) juga mengatakan adanya kompleksitas transaksi keuangan akibat impelementasi akuntansi berbasis akrua berdampak pada penyusunan laporan keuangan berbasis akrua yang jauh lebih kompleks sehingga dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrua di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Indikator Variabel dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah ketersediaan hardware, proses akuntansi terkomputerisasi, jadwal pemeliharaan dan ketepatan waktu jadwal pemeliharaan, ketersediaan perangkat lunak (*software*), pemanfaatan jaringan dan internet.

Peran Internal Audit

Menurut Agoes (2012), internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian audit internal perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. *The Institute of Internal Auditor* (2001) dalam Effendi (2012) telah melakukan redefinisi terhadap internal auditing dimana disebutkan bahwa internal auditing adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi (*consulting activity*) yang bernilai tambah (*value added*) dan meningkatkan operasi perusahaan. Dalam *The International Standart for the Professional Practice of Internal Auditing*, peran internal audit dibagi menjadi dua kategori utama yaitu jasa *assurance* dan jasa konsultasi (STAN, 2007). Peran internal audit sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas para manajer operasional. Indikator Variabel dalam Peran Internal Audit adalah penilaian terhadap keakuratan dan keandalan informasi, penilaian tingkat ketaatan terhadap prosedur, peningkatan kualitas penyajian informasi keuangan, fungsi pengawasan, identifikasi terhadap penyimpangan

Komitmen Organisasi

Menurut Mowday, *et.al.*, dalam Curtis dan Wright (2001), mengemukakan komitmen didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah organisasi. Curtis and Wright (2001) menjelaskan bahwa konsep ini dapat dipecah menjadi tiga komponen, yaitu: (1) Keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi; (2) Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi; dan (3) Kesiediaan bekerja keras sebagai bagian dari organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang baik berarti pegawai yang memiliki loyalitas terhadap organisasi di tempatnya bekerja dan akan berupaya untuk berusaha dengan optimal mencapai tujuan organisasi di tempatnya bekerja tersebut. Indikator Variabel dalam Komitmen Organisasi adalah hubungan identitas, berbagi nilai informasi, keterlibatan personal, keberatan dalam meninggalkan organisasi, keengganan mencari alternative, terinternalisasi norma/nilai organisasi, ketertarikan psikologis dengan nilai organisasi, keuntungan bergabung dengan organisasi

Pengaruh Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SAP berbasis akrual adalah prinsi-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Berarti apabila SAP diterapkan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah maka laporan keuangan pemerintah tersebut akan semakin berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2017) tentang pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan menyatakan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yusnita) yang menyatakan Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Langkat.

H₁ : Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Poerwadar-minta:2006). Yuliani (2010) telah melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Banda Aceh, dia menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat

dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) tentang pemahaman akuntansi mendapatkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aniftahudin (2016) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H₂ : Pemahaman Akuntansi Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan temuan BPK atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2016 telah mengungkapkan permasalahan Penyusunan LKPP belum didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal dan pengendalian yang memadai. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar melakukan identifikasi dan selanjutnya memperbaiki kesalahan-kesalahan penghitungan dalam sistem informasi penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan jelas sangat nyata sejak awal proses penganggaran hingga pertanggungjawaban laporan keuangan. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Yusnita (2017) Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aniftahudin (2016) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan menunjukkan arah positif.

H₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2014) internal audit merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan kegiatan yang ditelaah. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2014) yang menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mempunyai arti bahwa peran internal audit mempunyai pengaruh terhadap perubahan kualitas laporan keuangan. Penelitian bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endiyanto (2017) yang menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah positif.

H₄ : Peran Internal Audit Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderating

Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi sehingga menciptakan suatu kondisi keterikatan dan tanggungjawab terhadap organisasi. Menurut penelitian Sanjaya (2017) yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar. Hal ini menunjukkan semakin baik komitmen organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnita (2017) pada Pemerintah Kabupaten Langkat yang menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dapat memoderasi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.

H₅ : Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi komitmen organisasi.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderating

Dalam proses penyusunan Laporan keuangan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia. Roviyantje (2011) menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan produk dari ilmu akuntansi. Oleh karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi Pemerintah. Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep akuntansi akan berdampak pada kesalahan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Amaliah (2017) yang melakukan penelitian tentang penerapan sistem akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi menunjukkan hasil bahwa variabel sistem akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

H₆ : Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi komitmen organisasi

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena dengan penggunaan teknologi informasi dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan. Dalam pelaksanaannya penggunaan teknologi haruslah didukung dengan komitmen dari pimpinan maupun organisasi dengan cara penyediaan sarana dan prasarana baik secara hardware maupun software. Pada tahun 2017, pemerintah mengembangkan aplikasi terintegrasi yang berbasis web untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan atau sering disebut *internet financial reporting*. Penggunaan aplikasi pelaporan keuangan yang berbasis web, haruslah didukung dengan perangkat yang memadai seperti komputer dengan spesifikasi tinggi dan jaringan internet yang stabil untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian yang dilakukan Edlyn (2018) pemanfaatan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating yang dilakukan pada OPD Kota Dumai menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pemanfaatan teknologi dan informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

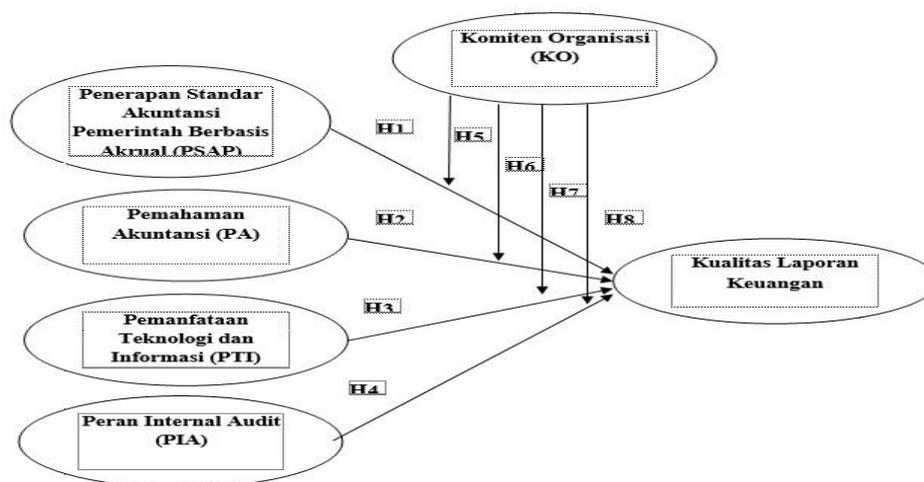
H₇ : Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi komitmen organisasi

Pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 peran inspektorat selaku internal audit pemerintah lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern selain sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Disamping itu peran internal dalam hal ini Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah adalah memberikan jaminan mutu (*quality assurance*) dan jasa konsultasi terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian Mutiana (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Endianto (2017) yang melakukan penelitian dengan mengenai efektivitas Standar akuntansi pemerintah, peran internal audit dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” yang menunjukkan hasil bahwa peran internal audit berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H₈ : Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemoderasi komitmen organisasi

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, yakni peneliti memberikan kuesioner langsung kepada responden yang terpilih sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat dan memahami tentang pokok bahasan penelitian yang sedang dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pusat Statistik di Lingkungan Provinsi Banten serta Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Banten yang mempunyai hubungan dalam mengelola Laporan keuangan dan langsung menjadi sampel penelitian dengan memakai metode sensus yaitu sebanyak 73 reponden. Pemilihan sampel jenuh dilakukan oleh peneliti untuk membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan sangat kecil. Variabel terikat disebut sebagai variabel dependen atau variabel kriteria. Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y). Variabel bebas (Independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam Metode PLS-SEM, variabel bebas disebut variabel eksogen/predictor. Dalam penelitian ini variabel eksogen yang digunakan adalah Penerapan Standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan Peran Internal Audit. Menurut Sugiyono (2013:64) mendefinisikan variabel moderating sebagai variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau mempelemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel moderating pada penelitian ini adalah Komitmen Organisasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian (Ghozali dan Latan, 2015). PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kasualitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Pengujian SEM ini menggunakan program SmartPLS versi 3.0. Dalam penelitian ini beberapa indikator dapat diproksi menjadi satu pernyataan atau lebih, maka untuk mendapatkan nilai dari indikator yang diproksi lebih dari satu pernyataan, dibuatlah rata-rata untuk indikator tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier meliputi : (1) statistik deskriptif; (2) uji model pengukuran (outer model); (3) uji model struktural (inner model).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan Smart PLS 3.0 dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :

Tabel 1
Nilai Loading Factor Setelah Reduksi

Nama Variabel	Simbol	Nilai Loading Factor	Kesimpulan	Rangking
Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	PSAP1	0,829	Valid	3
	PSAP2	0,874	Valid	2
	PSAP3	0,751	Valid	5
	PSAP4	0,891	Valid	1
	PSAP5	0,604	Valid	6
	PSAP6	0,753	Valid	4
Pemahaman Akuntansi	PA1	0,699	Valid	3
	PA2	0,921	Valid	1
	PA3	0,913	Valid	2
Pemanfaatan Teknologi Informasi	PTI1	0,834	Valid	2
	PTI2	0,761	Valid	3
	PTI3	0,660	Valid	5
	PTI4	0,692	Valid	4
	PTI5	0,889	Valid	1
Peran Internal Audit	PIA1	0,780	Valid	4
	PIA2	0,842	Valid	2
	PIA3	0,829	Valid	1
	PIA4	0,795	Valid	3
	PIA5	0,630	Valid	5
Komitmen Organisasi	KO1	0,678	Valid	5
	KO2	0,571	Valid	6
	KO4	0,765	Valid	3
	KO5	0,671	Valid	4
Kualitas Laporan Keuangan	KO7	0,783	Valid	2
	KO8	0,789	Valid	1
	KLK1	0,697	Valid	3
	KLK2	0,805	Valid	1
	KLK3	0,730	Valid	2
	KLK4	0,623	Valid	4

Tabel 2
Nilai Composite Reliability

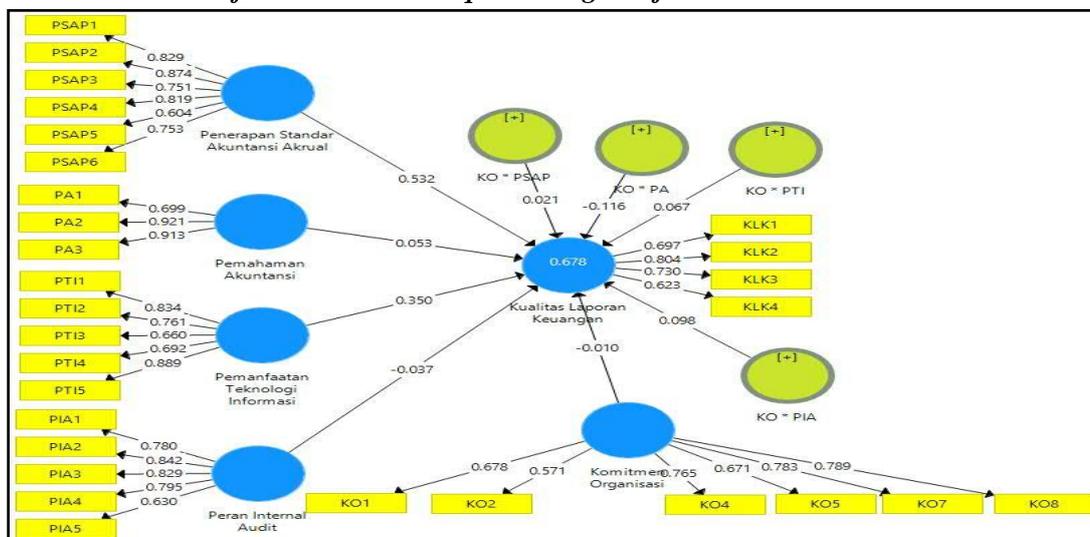
Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Penerapan Standar akuntansi Pemerintah	0,860	Reliabel
Pemahaman Akuntansi	0,807	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,886	Reliabel
Peran Internal Audit	0,879	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,900	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,884	Reliabel

Berdasarkan hasil uji *outer model*, yang meliputi uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN PEMODERASI KOMITMEN ORGANISASI
(Studi Pada Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten)

mengukur setiap variabel telah valid dan *reliabel*, sehingga telah memenuhi kriteria untuk dapat dilaksanakan pengujian selanjutnya.

Gambar 2
Nilai Koefisien Path dan R-square dengan Efek Moderasi



$$\text{Kualitas Laporan Keuangan} = 0,532 \text{ Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual} + 0,053 \text{ Pemahaman Akuntansi} + 0,350 \text{ Pemanfaatan Teknologi Informasi} - 0,037 \text{ Peran internal Audit} - 0,010 \text{ Komitmen Organisasi} + 0,021 \text{ Komitmen Organisasi} * \text{Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual} - 0,116 \text{ Komitmen Organisasi} * \text{Pemahaman Akuntansi} + 0,067 \text{ Komitmen Organisasi} * \text{Pemanfaatan Teknologi Informasi} + 0,098 \text{ Komitmen Organisasi} * \text{Peran Internal Audit}.$$

Tabel 3
Nilai T-Statistics

Independen	Dependen	Path Analysis	T Statistic	P Values	Kesimpulan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akruwal	Kualitas Laporan Keuangan	0,532	4,812	0,000	Diterima
Pemahaman Akuntansi	Kualitas Laporan Keuangan	0,053	0,102	0,518	Ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kualitas Laporan Keuangan	0,350	2,709	0,007	Diterima
Peran Internal Audit	Kualitas Laporan Keuangan	- 0,037	0,346	0,729	Ditolak
Komitmen Organisasi	Kualitas Laporan Keuangan	- 0,010	0,068	0,946	Ditolak
KO * PSAP	Kualitas Laporan Keuangan	0,021	0,177	0,859	Ditolak
KO * PA	Kualitas Laporan Keuangan	- 0,116	1,049	0,295	Ditolak
KO * PTI	Kualitas Laporan Keuangan	0,067	0,448	0,654	Ditolak
KO * PIA	Kualitas Laporan Keuangan	0,098	0,892	0,373	Ditolak

Pengaruh Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil pengujian pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,532 dengan nilai t statistik sebesar 4,863 dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil ini menggambarkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di satuan kerja Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat dihindari dan menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Yusnita (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti (2017) yang menunjukkan bahwa implementasi basis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,053 dengan nilai t statistik sebesar 0,0524 dan *p-value* sebesar 0,601. Karena nilai t statistik lebih kecil dari 1,96 serta nilai *p-value* > 0,05, maka pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi para pengelola keuangan di satuan kerja Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten sangat minim dikarenakan (1) latar belakang pendidikan pengelola keuangan hampir 98 % bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi; (2) para pengelola keuangan hampir 55% merangkap jabatan. Keterbatasan waktu para pengelola keuangan untuk belajar memahami akuntansi secara mendalam menyebabkan laporan keuangan yang disajikan hanya memenuhi kewajiban saja tanpa memperhatikan kualitas laporan keuangan yang disusun. Hasil penelitian ini sejalan dengan Halmawati dan Wati Sri Nova (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu Yuliani (2010) dan penelitian yang dilakukan oleh Aniftahudin (2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,350 dengan nilai t statistik sebesar 2,621 dan *p-value* sebesar 0,009. Karena nilai t statistik lebih besar dari 1,96 serta nilai *p-value* < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa para pengelola keuangan di satuan Kerja Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten telah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, para pengelola keuangan telah menggunakan teknologi dan informasi baik hardware maupun software dalam kegiatan pengelolaan keuangan di masing-masing satuan kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Primayana (2014) yang menyatakan bahwa tingginya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Yusnita (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Namun, peneliti ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwanda (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil bahwa peran internal audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,035 dengan nilai t statistik sebesar 0,350 dan *p-value* sebesar 0,727. Karena nilai t statistik lebih kecil dari 1,96 serta nilai *p-value* > 0,05, maka peran internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 18 menyatakan bahwa salah satu kegiatan pengendalian adalah pembinaan sumber daya manusia. Namun fungsi ini tidak berjalan pada Badan Pusat Statistik, dikarenakan pada tugas fungsi pada struktur organisasi Inspektorat Utama hanya melakukan kegiatan pengawasan kinerja, keuangan dan tujuan tertentu atas petunjuk Badan Pusat Statistik. Sehingga para pengelola keuangan menganggap peran internal audit yang dilakukan oleh Inspektorat tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan Martiningsih (2016) yang menyatakan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Provinsi NTB. Penelitian lain yang sejalan penelitian ini dilakukan oleh Devi (2017) yang menyatakan bahwa peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Binjai.

Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian moderasi komitmen organisasi terhadap pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,021 dengan nilai t statistik sebesar 0.174 dan *p-value* sebesar 0,862, nilai t statistik lebih kecil dari 1,96 serta nilai *p-value* > 0,05. antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan. Tahun 2015 Pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih bagi para pengguna laporan keuangan. Sehingga ada tidaknya komitmen organisasi tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan ketentuan hukum yang harus dilaksanakan pada Pemerintah pusat maupun daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah yang dipengaruhi komitmen organisasi belum mampu memperkuat maupun memperlemah dengan kualitas laporan keuangan di Kabupaten Solok Selatan. Namun penelitian ini tidak sejalan yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderating

Hasil pengujian moderasi komitmen organisasi terhadap pengaruh antara pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman akuntansi dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien patch positif sebesar 0,053 dengan nilai t statistik sebesar 0,0524 dan *p-value* sebesar 0,601. Karena nilai t statistik lebih kecil dari 1,96 serta nilai *p-value* > 0,05. Secara konsep pemahaman akuntansi yang kuat akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, diperlukan suatu proses dan waktu yang panjang dalam memahami konsep-konsep akuntansi secara mendalam. Latar belakang pendidikan non akuntansi dan rangkap jabatan yang ada satuan kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menyebabkan proses ini tidak berjalan, sehingga seringkali para pengelola keuangan tidak memahami tugas dan fungsinya walaupun secara formal telah menjadi

tanggung jawabnya. Ada tidaknya komitmen organisasi tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara pemahaman akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, dikarenakan para pengelola keuangan yang merangkap jabatan di pekerjaan teknis lebih mementingkan pekerjaan teknis dibandingkan dengan pekerjaan pengelolaan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andrianto (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderating.

Hasil pengujian moderasi komitmen organisasi terhadap pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien patch positif sebesar 0,067 dengan nilai t statistik sebesar 0,444 dan *p-value* sebesar 0,657. Karena nilai t statistik lebih kecil dari 1,96 serta nilai *p-value* > 0,05. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi harus tetap dilakukan, ada tidaknya komitmen organisasi tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Yusnita (2017) yang menunjukkan bahwa komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian lain yang sejalan yang dilakukan oleh andrianto (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderating

Hasil pengujian moderasi komitmen organisasi terhadap pengaruh antara peran internal audit dengan kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara peran internal audit dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien patch negatif sebesar - 0,037 dengan nilai t statistik sebesar 0,350 dan *p-value* sebesar 0,727. Karena nilai t statistik lebih kecil dari 1,96 serta nilai *p-value* > 0,05. terhadap kualitas laporan keuangan. Fungsi pengendalian internal yang menjadi tugas dan fungsi kewenangan dari Aparat pengawas intern Pemerintah kurang dapat dirasakan oleh para pengelola keuangan. Hal ini dikarenakan fungsi yang ada pada APIP Badan Pusat Statistik hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, sehingga peran internal audit dirasakan tidak dapat membantu dan menjamin bahwa yang dilakukan oleh para pengelola keuangan sesuai dengan aturan yan ditetapkan. Sehingga ada tidaknya komitmen organisasi tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara peran internal audit dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrianto (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Edlyn (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern Pemerintah pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten. Sedangkan Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di Badan Pusat Statistik Se-

Provinsi Banten. Peran Internal Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja di Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemahaman dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh antara peran internal audit dengan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten.

Keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan kuesioner, sehingga kemungkinan ada kelemahan-kelemahan yang ditemui seperti jawaban responden yang kurang cermat dan pernyataan yang bias yang dapat menyebabkan responden kurang cermat dalam memberikan jawaban dikarenakan berasal dari persepsi masing-masing responden dan Penelitian hanya mencakup 9 satuan kerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Banten yang merupakan Instansi Pemerintah Pusat, sehingga tidak digeneralisasikan untuk Instansi Pemerintah daerah.

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian yang dikemukakan, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan. Diharapkan dalam melakukan pengumpulan dilakukan melalui wawancara yang mendalam ke setiap responden, untuk mengali informasi dan menjelaskan pernyataan yang dikuesioner kepada responden agar tidak terjadi bias pernyataan, dikarenakan pemahaman para pengelola keuangan khususnya di Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sangat minim dan Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan khususnya di Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Banten, kami menyarankan pimpinan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dapat menyampaikan kepada Kepala Badan Pusat Republik Indonesia agar terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui : (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan teknis akuntansi serta beasiswa pendidikan akuntansi , (2) merekrut dan menambah personel penyusun laporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi (3) meningkatkan penyediaan sarana teknologi dan informasi baik software maupun hardware bagi pengelola keuangan (4) merekrut dan menambah personel auditor yang kompeten dalam rangka meningkatkan pengawasan dan memberikan jasa konsultansi bagi para pengelola keuangan (5) komitmen organisasi dalam hal ini pimpinan Badan Pusat Statistik untuk memberikan perhatian yang lebih bagi para pengelola keuangan yang merupakan pejuang WTP baik dari sisi jenjang karier yang jelas dan reward, dapat meningkatkan motivasi bagi para pengelola keuangan untuk bekerja lebih optimal demi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Maka Pada peneliti selanjutnya diharapkan penelitian dapat dilakukan pada satuan kerja pada Badan Pusat Statistik yang memiliki cakupan yang cukup luas seperti Badan Pusat Statistik Se-Jawa Barat atau Se-Jawa timur yang memiliki satuan kerja lebih dari 35 Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., dan Jogiyanto, H. M. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Abdullah, S. & Halim, A. (2006) Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, pp. 53-64*.
- Agoes, S. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (edisi 4 buku 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Shetwi, M., Ramadili, S.M., Chowdury, T.H.S., & Sori, Z.M. (2011). Impact of Internal Audit Function (IAF) on Financial Reporting Quality (FRQ): Evidence from Saudi Arabia. *African Journal of Business Management, Vol. 5, No. 27, pp. 11189-11198*.

- Andrianto, Elvin. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Sleman). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (edisi 3)*. Jakarta: Erlangga.
- Charolina, Ovita. 2013. Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Fairness Volume 3 Nomor 3, 2013 : 82-94*.
- Devi, Prima Citra. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Binjai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. (Tesis) Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Dewa Kadek,dkk.(2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Peran Intenal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *e-Journal SI Ak Universitas Ganessa. Jurusan Akuntansi Program SI(Vol: 8 No.2 Tahun 2017)*.
- Evicahyani, S.I. (2015). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan* (Tesis). Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Fitrisyah, Aidil (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Etika Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, Vol IX. No. 3 September 2017*.
- Ghozali, I (2014). *Structural Equation Modeling : Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (Edisi 4)*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Maskyur, Noprial Valenra (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Organisasi Terhadap Kualias Laporan Keuangan (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri hulu). Fakultas Ekonomi Riau, Pekanbaru.). *JOM FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*.
- Hartati. 2013. *Pengaruh Pendidikan, Pelatihan Teknis Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Tadulako. Sulawesi Tengah.
- Inapti, M. Ali Fikri Biana Idha 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 9 (1) April 2016, P-ISSN : 1979-858X;E-ISSN : 2461-1190 Page 27-42*.
- Manullang, Octrina Elizabet (2016). *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating* (Tesis). Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Michael C. Jensen, William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structur. *Journal of Financial Economic*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Mowday, R.T, Steers R.M., dan Porter,L.W. (1979). Measurement Commitment of Organizational. *Journals Vocational Behavior*.
- Mutiana, Liza 2017. Pengaruh Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Daruussalam, Volume 3 Nomor 2, September 2017*.
- Nyota, H. & Fadzil . F. H (2011). Fiscal Decentralization after implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. *World Review of Businees Research, Vol. 1, No. 2 pp.51-57*.
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05 Tahun 2014 tentang *Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Pada Pemerintah Pusat.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Purwanti, Meilani.Wasman. 2014. Pemahaman Akuntasn, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Intenal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Bandung). *Jurnal Bisnis dan Manejemen, Vol.4 No.3 Desember 2014. Bandung.*
- Risman. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis VO. X o. 1 Januari 2018.*
- Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2008). *Organizational Behavior (12th ed).* Jakarta: Salemba Empat.
- Sagara, Y (2015). The Effect of Implementation Accounting Information System and Competence of Human Resouces on the Quality of Financial Reporting. *Research Journal Of Finance and Accounting Universitas Padjajaran , Vol. 6 No. 10.*
- Sanjaya, Aditya (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *JOM FEKON Vol.4 No.1 (Februari) 2017*
- Silaban, Nur Eveyn Jelita. 2017. *Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komptensi Sumber daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.* (Tesis) Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Sumatera Utara.
- Sudiarianti, N.M (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Tesis). Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian.* Alfabeta. Bandung
- Suwanda (2015). Factors Affecting Quality of local Government Financial Statements To Get Unqualified Opinion (WTP) of the Audit Board of The Republic Of Indonesia (BPK). *Research Journal Of Finance and Accounting Vol. 6 No. 4 2015.*
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Yuliani, Safrida (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh). Fakultas Ekonomi Syah Kuala. Aceh. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol.3 No. 2 Juli 2010. Hal 206-220.*
- Yusnita, Tengku Erna.2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating.* (Tesis) Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Sumatera Utara
- Wilkinson, W. J., Michael, J. C., Raval, V., & Bernard, W. O. W. (2000). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications* (Fourth Edition). John Wiley and Sons. Inc
- Wijayanti, Ratna. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Journal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 Nomor 3, Maret 2017.*